

---

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2016-2020**

**Febelina Esther Basna<sup>1\*</sup>, Agustinus Salle (agustinussalle@gmail.com)<sup>1</sup>  
Rama Soyan Arung Lamba(ramajr88@gmail.com)<sup>1</sup>**

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih  
\*Corresponding Author*

**Abstract**

*Study this aim for knowing Influence Local Revenue , Allocation Fund General, Allocation Fund Special, Profit Sharing Fund, and Autonomy Fund Special to Capital Expenditures for District Governments Bintuni Bay 2016-2020. Sources acceptance that comes from from Transferred Central Government to Local Government so that Local government is sued for could optimize service to public by effective and efficient. With method increase Regional Original Income and welfare Public wide. Sourced data from Budget This Regional Revenue and Expenditure (APBD) is secondary data obtained from djpk.kemenkeu and processed with SPSS program help version 26. The analytical model used in study this is Analysis Test Multiple Linear Regression and Partial t Test and Assumption. Research results showing that Regional Original Revenue (PAD), Allocation Fund Special (DAK), Revenue Sharing Fund ( DBH), Autonomy Fund Special (OTSUS) no take effect significant to Allocation Budget Capital Expenditure. While the Allocation Fund General (DAU) is influential Positive Significant to Allocation Budget Capital Expenditures for District Governments Bintuni Bay 2016-2020.*

**Keywords:** *Local Revenue; Allocation Fund General; Allocation Fund Specifically; Profit Sharing Funds; Autonomy Funds Special*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020. Sumber-sumber penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransferkan kepada Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mengotimalkan pelayanan kepada publik secara efektif dan efisien. Dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat luas. Data yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari djpk kemenkeu dan diolah dengan bantuan program spss versi 26. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji parsial t serta Uji Asumsi Klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus (OTSUS) tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Positif Signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020.

**Kata Kunci:** *Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Dana Bagi Hasil; Dana Otonomi Khusus*

## Pendahuluan

Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan memberikan harapan baru dengan tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal, tidak lagi terkonsentrasi di Pusat. Dengan memberikan definisi Otonomi sebagai berikut. “Otonomi daerah diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada daerah otonom (dalam hal ini kabupaten atau kota) untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya sesuai dengan aspirasi daerah setempat dan tidak menyalahi peraturan perundangundangan yang berlaku”. Untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara luas dan bertanggung jawab dituntut diterapkannya manajemen pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, Dan OTSUS terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2010**

NO	TAHUN	PAD	DAU	DAK	DBH	OTSUS	BM
1	2016	53215	550987	272825	7790	213585	958558
2	2017	41893	549667	156895	373067	144416	810178
3	2018	40053	549667	115587	9763	230150	662258
4	2019	52112	561065	139789	19208	847420	774320
5	2020	88073	503821	109259	10668	1201577	1308678

Sumber : 1

Andi (2005) menunjukkan terjadi perbedaan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antara daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Adanya perbedaan disparitas PAD tersebut mengakibatkan ketimpangan fiskal antar daerah, daerah yang memiliki PAD besar akan mampu untuk mencukupi sebagian besar belanjanya, sebaliknya dengan daerah yang memiliki PAD relatif kecil akan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan belanjanya. Untuk mengatasi perbedaan tersebut di perlukan campur tangan pemerintah pusat dengan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Perimbangan.

Tujuan dari transfer Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar tercapainya standar pelayanan publik yang baik. Dengan adanya transfer Dana Perimbangan ini Pemerintah Daerah dapat menggunakannya untuk melaksanakan kewenangannya dan tanggung jawab kepada masyarakat secara transparan dan akuntabilitas. Dana Perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk pemerataan Desentralisasi Fiskal dan mengurangi kesenjangan fiskal dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang kesehatan. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Daerah yang bersifat Nasional dapat berupa Pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, pertanian, kehutanan, perumahan dan pemukiman dan lain-lainnya. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan Dana yang dialokasikan langsung kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus kepentingan daerahnya secara masing-masing yang dapat berupa pertambangan gas bumi, pertambangan minyak bumi, perikanan dan lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 161 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021. Bupati Kasihiw mengatakan rencana perubahan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Teluk Bintuni meliputi perubahan proyeksi pendapatan Asli Daerah, pergeseran alokasi belanja daerah dan perubahan proyeksi pembiayaan daerah. Perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah yang semula di rancangankan sebesar Rp. 1,7 Triliun lebih hanya turun sekitar Rp 6 Miliar. Penurunan ini disebabkan adanya penyesuaian terhadap perubahan Alokasi transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Alokasi Dana Otsus Reguler, serta adanya Alokasi Dana Hibah dari Badan Nasional Penganggulangan Bencana Tahun Anggaran 2021. Perubahan Alokasi Belanja Daerah yang semula Rp. 2 Triliun lebih berubah turun menjadi Rp. 1,7 Triliun lebih. Penurunan tersebut di akibatkan karena adanya perubahan dan Alokasi Anggaran untuk mendukung penanganan pelaksanaan vaksin untuk pemulihan ekonomi, serta kegiatan Penanganan Penanggulangan Bencana Daerah, yang di Alokasikan Dana Hibah dari Badan Nasional Penganggulangan Bencanan pada tahun Anggaran 2021. Serta adanya pergeseran anggaran antara organisasi, kegiatan untuk mendukung program daerah dan program lainnya yang sifatnya mendesak dan tidak dapat di tunda.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus (Otsus) berpengaruh secara parsial terhadap alokasi anggaran modal pemerintah daerah kabupaten teluk bintuni. Tujuan penelitian yaitu mengetahui besar pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH dan Dana Otsus secara parsial terhadap alokasi anggaran modal pemerintah kabupaten teluk bintuni.

## **Kajian Pustaka**

### *Teori Federalisme Fiskal (Fiscal Federalism Theory)*

Federalisme Fiskal adalah studi yang membahas mengenai hubungan keuangan antara tingkat pemerintah di mana pada sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintah yang berbeda. Fiskal dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merancang keuangan pada tingkat Nasional maupun Subnasional. Federalism ditetapkan oleh suatu Negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal dalam pemerintahannya. Pada dasarnya konsep federalism fiskal yang dimaksud adalah pemerintah tingkat II (Kabupaten/ kota) merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau dengan kata lain di beberapa Negara yang berbentuk federal dimana pemerintah negara bukan bagian sebagai pelaku otonom Prasetya (2013).

### **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD merupakan instrument yang digunakan sebagai alat dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam pelaksanaannya, APBD dapat menjelaskan mengenai kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah sesuai dengan keunikan dan potensinya masing-masing.

Komposisi APBD dibagi menjadi tiga bagian diantaranya yaitu :

1. Belanja Barang Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

#### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan yang didalamnya termasuk Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD merupakan sumber-sumber atau penerimaan yang berasal dari wilayah itu tersebut yang dipunggut berdasarkan peraturan Undang-undang berlaku pada suatu daerah Halim (2004) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua yang diperoleh dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri yang dipunggut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor Pendapatan Asli Daerah memegang peranan yang penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kebutuhan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi empat bagian diantaranya yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

#### Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bagian dari belanja Daerah Otonom yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Alokasi Umum dari suatu daerah dialokasikan berdasarkan pada formula yang berdiri dari celah fiskal serta alokasi dasar, celah fiskal sendiri merupakan selisish dari kapasitas dan kebutuhan fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan beberapa variabel seperti jumlah penduduk, indeks biaya pembangunan, luas wilayah, produk dalam negeri, regional bruto per kapita dan indeks pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan kapasitas fiskal dapat diukur berdasarkan pendapatan asli daerah masing-masing dan dana bagi hasil. Kemudian alokasi dasar dihitung dari total gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

#### Dana Alokasi Khusus (DAK)

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat (DAK) merupakan salah satu dari Dana Perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang ditransferkan kepada Pemerintah Daerah yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bagian dari TKD dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi kepentingan Nasional dan membantu operasional layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

Bahar (2009) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatankegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional, 16 khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana bagi pelayanan

kepada masyarakat yang belum mencapai standar tertentu. atau untuk mendorong percepatan pembangunan suatu daerah.

DAK terbagi menjadi dua bagian diantaranya yaitu :

1. DAK Fisik.
2. DAK Non Fisik.

#### Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil atau DBH adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PP No.12 Tahun 2019). Dengan adanya DBH diharapkan dapat meningkatkan dan membantu kemampuan keuangan daerah untuk digunakan sebagai dana dalam alokasi Belanja Modal sehingga daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu dana pokok yang potensial bagi pemerintah daerah. dengan demikian tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk meningkatkan keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan daerah penghasil.

#### Dana Otonomi Khusus (OTSUS)

Dana Otonomi Khusus adalah Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi tertentu. Dana OTSUS diberikan oleh Pemerintah sebagai konsekuensi dari status otonomi khusus dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat adalah pemberian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan rakyat Papua menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak masyarakat Papua.

#### Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk belanja modal Diantaranya digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi. Pembangunan dengan menekankan pada sektor sentral yang berkaitan dengan masyarakat tersebut dengan harapan masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah, tersediannya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi..

Jenis-jenis Belanja Modal diantaranya yaitu:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya.

#### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020 Merupakan data dekunder yang diperoleh dari direktorat jenderal keuangan dengan menggunakan lima variabel bebas diantaranya yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

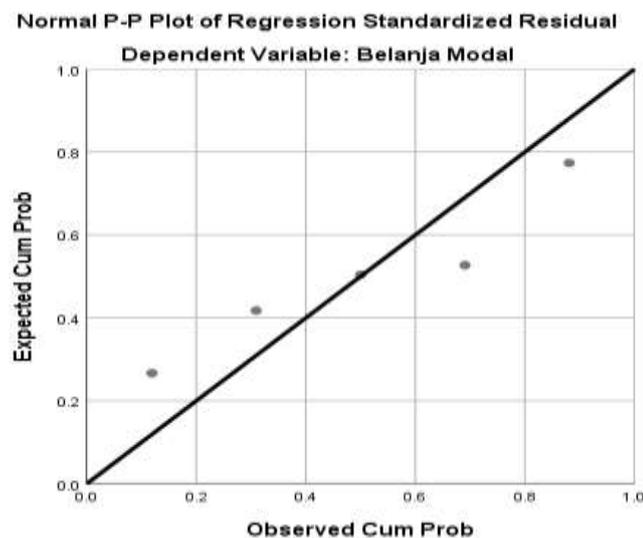
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Otonomi Khusus (OTSUS). Sedangkan yang menjadi variabel terikat yaitu : Belanja Modal.

## Hasil dan Pembahasan

### Uji Normalitas

Hasil uji Normalitas dengan menggunakan Probability-Plot. pada gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal sehingga dapat di simpulkan bahwa data dalam model regresi berdistribusi secara normal.

**Gambar 4.1**  
**Uji Normalitas**



Sumber : Data diolah, 2022

## Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.1**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5210978.214	,000	,906	,108	,053		
	PAD	12.332	2.240	,954	5.504	,012	1.000	1.000
	DAU	-9.930	2.940	-.890	-3.378	,004	,556	1.798
	DAK	-.042	2.174	-.001	-.019	,986	,684	1.463
	DBH	-.331	,874	-.214	-.379	,730	,708	1.412
	OTSUS	,362	,224	,681	1.612	,205	,369	2.708

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 di peroleh hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 5.210.978.214 + 0,12.332 X_1 + 0,-9.930 X_2 + 0,-0.042 X_3 + 0,-.331 X_4 + 0,362 X_5 + e$$

## Uji Parsial T

Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Dengan tingkat signifikan atau nilai kritis sebesar 0,05%

**Tabel 4.2**  
**Ujit T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5210978,214	,000	.906	-.108	.053
	PAD	12,332	2.240	.954	5.504	.012
	DAU	-9.930	2.940	-.890	-3.378	.004
	DAK	-.042	2.174	-.011	-.019	.986
	DBH	-.331	.874	-.214	-.379	.730
	OTSUS	.362	.224	.681	1.612	.205

a. Dependent Variable: Belaja Modal

Sumber : Data diolah, 2022

Dengan demikian perhitungan nilai T tabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
Ttabel = {  $\alpha$  ; df = (n-k) } = 5% ; df = (6-5) = 0,05 ; df = 1 = 6,313

Dengan demikian nilai estimasi pada T tabel sebesar 6,313, berdasarkan uji t pada tabel 4.5 pengujian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah T1 hitung = 5.504, T Tabel = 6,313. T1 hitung < T tabel. Nilai sig = 0,012 > 0,05 Maka, Ho di terima kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020.
2. Variabel Dana Alokasi Umum T hitung = -3.378, T tabel = 6, 313. T 2 hitung < T tabel . Nilai sig = 0, 004 < 0,05 maka, Ho di terima kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel Dana 45 Alokasi Umum terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020.
3. Variabel Dana Alokasi Khusus T hitung = -.019, T tabel = 6,313. T3 hitung < T tabel. Nilai sig = 0, 986 > 0,05 maka, Ho diterima kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Anggran Belaja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020.
4. Variabel Dana Bagi Hasil T hitung = -.379, T tabel = 6,313. T4 hitung < T tabel . Nilai sig = 0,730 > 0,05 maka, Ho diterima kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Variabel Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020.
5. Variabel Dana Otonomi Khusus T hitung = 1.612, T tabel = 6,311. T5 hitung < T tabel . Nilai sig = 0, 205 > 0,05 maka, Ho diterima kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Variabel Dana Otonomi Khusus terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020

---

## Pembahasan

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

Secara Parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  $T_1$  hitung = 5.504,  $T$  Tabel = 6,313.  $T_1$  hitung <  $T$  tabel. Nilai sig = 0,012 > 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2011) dan Arbi Gugus Wandira (2013) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Alokasi Anggaran Belanja. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian ini. Dimana, PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah.

### Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

Secara Parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  $T$  hitung = -3.378,  $T$  tabel = 6,313.  $T_2$  hitung <  $T$  tabel. Nilai sig = 0,004 < 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hustianto Sudarwadi (2015) dan Asti Mutiara (2020) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.

### Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

Secara Parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  $T$  hitung = -.019,  $T$  tabel = 6,313.  $T_3$  hitung <  $T$  tabel. Nilai sig = 0,986 > 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi, Ayu, Nurlela & Chomsatu (2016) dan Edy dan Wenny (2013) mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

### Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

Secara Parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  $T$  hitung = -.379,  $T$  tabel = 6,313.  $T_4$  hitung <  $T$  tabel. Nilai sig = 0,730 > 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Variabel Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widya Yana (2018) yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.

### Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

Secara Parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  $T$  hitung = 1.612,  $T$  tabel = 6,311.  $T_5$  hitung <  $T$  tabel. Nilai sig = 0,205 > 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Variabel Dana Otonomi Khusus terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftahur

---

Rahma (2021) mengatakan bahwa Dana Otonomi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020. Maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh (negatif signifikan) terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh (negatif signifikan) terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh (negatif signifikan) terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020.
5. Dana Otonomi Khusus (OTSUS) tidak berpengaruh (negatif signifikan) terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016-2020.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi Belanja Modal. Dengan cara menambah variabel-variabel lainnya seperti : Luas wilayah, Belanja Pegawai, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Pajak Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Belanja Hibah, Produk Domestik Regional Bruto dan lain-lain sebagainya.
2. Berhubung penelitian ini hanya dilakukan pada satu Kabupaten di Provinsi Papua Barat yakni Kabupaten Teluk Bintuni. Maka bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek penelitiannya.
3. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menambah rentang waktu pengamatan yang lebih dari lima tahun sehingga dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta memberikan hasil yang lebih efisien dan efektif.
4. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, diharapkan agar lebih dapat memperhatikan keuangan daerahnya sebagai langkah dalam mengoptimalkan peningkatan pelayanan daerah. dan pemerintah Daerah diharapkan agar lebih menggali potensi yang ada di daerah Kabupaten agar menambah Pendapatan Asli Daerah dan lebih memanfaatkan secara maksimal pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sehingga dapat meningkatkan Alokasi Anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Teluk Bintuni.
5. Bagi Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, diharapkan ikut berpartisipasi dan turut serta dalam pengembangan potensi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.

---

**Daftar Pustaka**

- Abdul Halim. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta UPP STIM YKPN.
- Abdul Halim. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah Sektor Publik*, Jakarta. Salemba Empat.
- Andreas Marzel Pelealu. (2013, Desember 4). Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *jurnal EMBA*, 189-197.
- Yana, W. (2018). *Pengaruh DAU, DBH, DOK terhadap Belanja Modal dengan SILPA sebagai variabel pemoderasi pada Provinsi Aceh*. Sumatra Utara, Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas.
- Mutiara, A. (202). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK) dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal*. Tegal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Pancasakti.
- Ghozali. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan prgram SPSS*. (UNDIP, Ed.) Edisi ke III.
- Sekaran. (2006). *Research Method For Bussiness*, Jakarta Salemba Empat.
- Suparmoko. (2010). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi.
- Supadmi, I. A. (2016, juni 3). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL PADA PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. *Vol.15*, 409-438.
- Lubis, H. U. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)*.
- Rahmatul Mulya, Bustamam. (2016). *Pengaruh Flypaper Effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh (Studi Empiris pada Pemeritah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, vol.1, Hal. 190-198.
- Kambuaya, M. (2009). *Peran Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Papua*. Makassar.
- Muroha, S. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Yovita, F. M. (2011). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap penghasilan Anggaran Belanja Modal*. *Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Diponegoro*.
- Depgadri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*
- Depdagri, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 *tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat*
- Depdagri, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Depdagri, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

---

Depdagri, Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2020 *tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)*

Depdagri No. 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Sumber : HYPERLINK "http://www.djpk.kemenkeu.go.id" [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

sumber : <https://klikpapua.com/papua-barat/teluk-bintuni/apbd-p-2021-teluk-bintuni-ditetapkan-rp17-triliun.html>